



RENCANA STRATEGIS

BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2025 - 2029



Kata Pengantar


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Draf Rencana Strategis (Renstra) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik.


Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem akuntabilitas kinerja di lingkungannya. Penyelenggaraan tersebut mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur agar terlaksana dengan lebih terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur serta stakeholder yang telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif dan inovatif. Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Semoga target kinerja yang ditetapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah daerah dan sekolah untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 15 Oktober 2025
Plt. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ifran Karim, S.I.Pem, M.Pd
NIP. 197006262005011001



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	18
 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	 24
2.1. Visi Misi.....	24
2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan	25
2.3. Sasaran Strategis	26
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	 29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.....	29
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	31
3.3. Kerangka Regulasi	35
3.4. Kerangka Kelembagaan	36
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 41
4.1. Target Kinerja	41
4.2. Kerangka Pendanaan	44
 BAB V PENUTUP.....	 45
 Lampiran	
1. Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
2. Matrik Kinerja dan Pendanaan	
3. Pohon Kinerja	

Daftar Tabel

Tabel 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan Tahun 2020 – 2021	3
Tabel 2. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan Tahun 2022 – 2024	4
Tabel 3. Program dan Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 – 2024.....	5
Tabel 4. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 – 2024.....	6
Tabel 5. Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	25
Tabel 6. Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	26
Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.....	27
Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	27
Tabel 9. Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indikasi Risiko	28
Tabel 10. Sasaran Strategis Diten PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Prioritas Nasional 4.....	30
Tabel 11. Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah..	31
Tabel 12. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	31
Tabel 13. Aparatur Sipil Negara BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.....	38
Tabel 14. Proyeksi kebutuhan SDM BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029	38
Tabel 15. 6 Area Perubahan	40
Tabel 16. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	41
Tabel 17. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur..	43
Tabel 18. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 - 2029.....	44

Daftar Gambar

Gambar 1. Angka Kesiapan Sekolah (APK) Provinsi Nusa Tenggara Timur	7
Gambar 2. APK dan APM PAUD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 – 2024	8
Gambar 3. APK 7-12 Tahun, APK dan APM SD/Sederajat Provinsi NTT	9
Gambar 4. APS 13-15 Tahun, APK dan APM SMP/Sederajat Provinsi NTT	10
Gambar 5. APS 16- 18 Tahun, APK dan APM SMA/SMK/Sederajat Provinsi NTT	12
Gambar 6. Data Anak Tidak Sekolah Tahun 2025	13
Gambar 7. Data Rapor Pendidikan 2023, 2024 dan 2025	14
Gambar 8. Data Kemampuan Literasi Peserta Didik di Provinsi NTT	15
Gambar 9. Data Kemampuan Numerasi Peserta Didik di Provinsi NTT	16
Gambar 10. . Data Kemampuan Pendidikan Karakter Peserta Didik di Provinsi NTT	16
Gambar 11. Data Kemampuan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik di Provinsi NTT	17
Gambar 12. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur	18
Gambar 13. Data Sekolah dan Guru Provinsi NTT	20
Gambar 14. Data Jumlah Pegawai BPMP Provinsi NTT	21



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen dan mendukung upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2025 – 2029 disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah periode 2025 - 2029 yang berpedoman kepada teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Rencana Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur memuat rumusan sasaran program dan kegiatan dengan mengacu kepada kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan Rencana Strategis Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen sebagai payung bagi Unit Pelaksana Teknis di daerah agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, mensinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

Bersasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan dalam menyusun strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh - sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Capaian Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 – 2024

Pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur berdasarkan Data Rapor Pendidikan Kab/Kota yang merupakan hasil Asesmen Nasional (AN) satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Selama periode tahun 2020 - 2024 hasil analisis Asesmen Nasional melalui data rapor pendidikan telah menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Kegiatan (SK 1) Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan				
IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>score card</i>) minimal 75	26,50%	28,14%	27,40%	36,80%
IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5,00%	2,0%	5,00%	6,59%
IKK 1.3 Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95,00%	96,27%	95,00%	98,27%

Tabel 1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan Tahun 2020 – 2021

Sumber Data: Rapor Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 – 2021

Pada tabel 1 Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode target Renstra BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 - 2021 sebagai berikut :

Persentase satuan pendidikan yang memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 dengan menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari Aplikasi PMP dengan cara menetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 75. Hasil capaian menunjukkan bahwa persentase rata-rata kinerja sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 sebesar 28,14% meningkat pada Tahun 2021 menjadi 36,80%.

Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survey Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk menunjukkan peningkatan dengan asumsi semakin kecil persentase kesenjangan maka semakin baik mutu pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu dari kesenjangan sebesar 2,60% di Tahun 2020 kemudian meningkat menjadi 6,59% pada Tahun 2021.

Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan menunjukkan persentase jumlah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki rapor dapodik (data pokok pendidikan) yang akurat, terbarukan, dan berkelanjutan pada Tahun 2020 sebanyak 96,27% yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 98,27%.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Kegiatan (SK 1) Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen						
IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0,98%	2,35%	1,96%	3,14%	3,92%	13,12%
IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25,00%	100%	30,00%	21,74%	35,00%	43,47%

Tabel 2. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan Tahun 2022 – 2024

Sumber Data: Rapor Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 – 2024

Pada tabel 2 Peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode target Renstra BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 - 2024 menunjukkan data sebagai berikut :

Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajaran dihitung berdasarkan persentase dari satuan pendidikan PAUD dan DIKMAS di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meningkat nilai akreditasinya pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah total satuan pendidikan PAUD dan Dikmas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data berdasarkan hasil akreditasi BAN PAUD menunjukkan bahwa persentase pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya pada periode akhir Renstra BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 meningkat menjadi 13,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) menunjukkan bahwa Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebesar 43,47%. Artinya, 56,53% kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum meningkat rapor pendidikannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rapor pendidikan yang diterima pada Tahun 2024, merupakan hasil Asesmen Nasional yang dilakukan pada Tahun 2023, sedangkan Rapor Pendidikan Tahun 2023 merupakan hasil

Asesmen Nasional yang dilakukan pada Tahun 2022. Berdasarkan hasil asesmen nasional tersebut menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang fokus kepada kegiatan – kegiatan yang dapat mendorong serta mengoptimalisasikan pemanfaatan rapor pendidikan oleh pemda dan satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2020 – 2024 sebagaimana berikut :

Tahun Anggaran	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2020	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	30.734.068.000	30.124.887.000
2021	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	21.099.454.000	20.728.110.446
2022	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	24.952.024.000	24.748.243.909
2023	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	31.502.078.000	30.966.915.933
2024	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	39.524.039.000	38.245.866.482

Tabel 3. Program dan Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 – 2024

Sumber : Laporan Keuangan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 – 2024

1.1.2. Tata Kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. BB/BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen mendukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi melalui peningkatan pelaksanaan SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berupaya dalam mewujudkan tata kelola yang baik melalui peningkatan nilai SAKIP dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) selama periode Renstra 2020 - 2024 sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Sasaran Kegiatan (SK 2) Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur										
IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	BB	B (67,77)	BB	BB (75,98)	BB	BB (78,00)	A	A (80,55)	A	A (82,10)
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur	81,00	97,80	82,00	95,64	83,00	96,78	90,00	95,53	95,55	99,51

Tabel 4. Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 – 2024

Sumber : Laporan Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 – 2024

Rata-rata capaian kinerja SAKIP dan NKA BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi meningkat setiap tahunnya dan sudah tergolong baik, seperti capaian predikat SAKIP meningkat dari BB menjadi A, dan capaian Nilai Kinerja Anggaran yang selalu melebihi target selama 5 (lima) berturut - turut. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur masih memerlukan upaya untuk mendapatkan capaian yang lebih baik, dan berkomitmen untuk terus mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja SAKIP dan NKA sebagai bagian dari indikator kinerja Rencana Strategis 2025 - 2029.

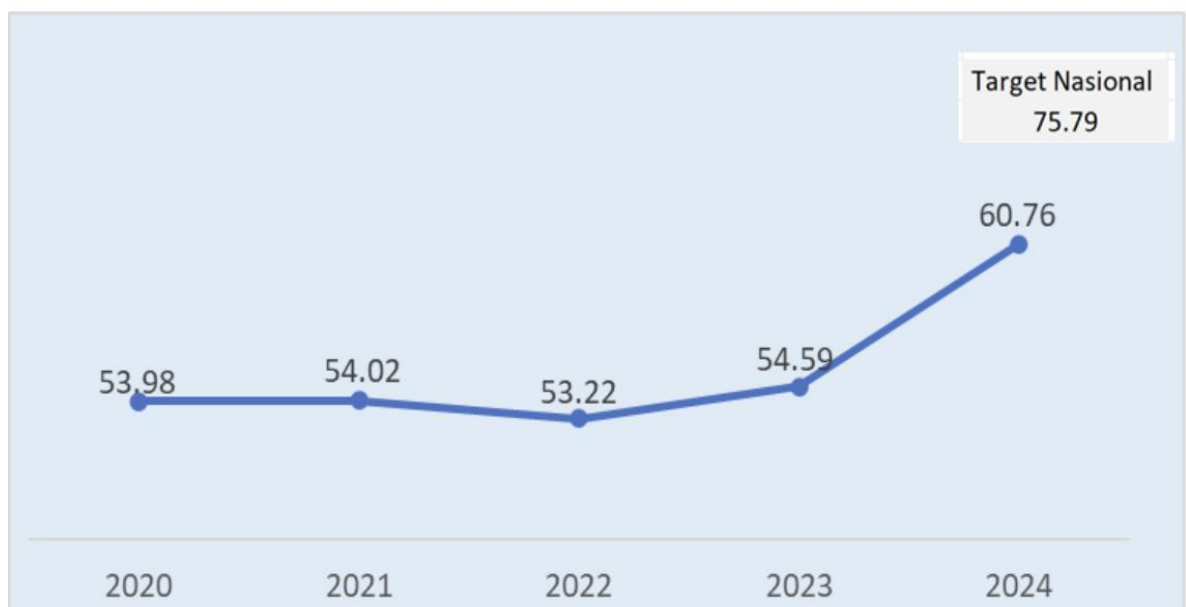
1.1.3. Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator untuk menilai pencapaian akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah (APS, APK dan APM) merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan.

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan prasekolah atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Sehubungan dengan adanya program PAUD satu tahun pra—SD, pendidikan prasekolah diharapkan dapat mendukung kesiapan anak untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan formal. Indikator pendidikan yang bersesuaian dengan isu ini adalah AKS (Angka Kesiapan Sekolah). Indikator ini melihat seberapa besar anak—anak yang saat ini menduduki kelas 1 SD/ sederajat telah mengenyam pendidikan prasekolah sebelumnya. Jenis pendidikan prasekolah yang dihitung dalam AKS adalah TK/RA/BA dan PAUD sejenis lainnya.

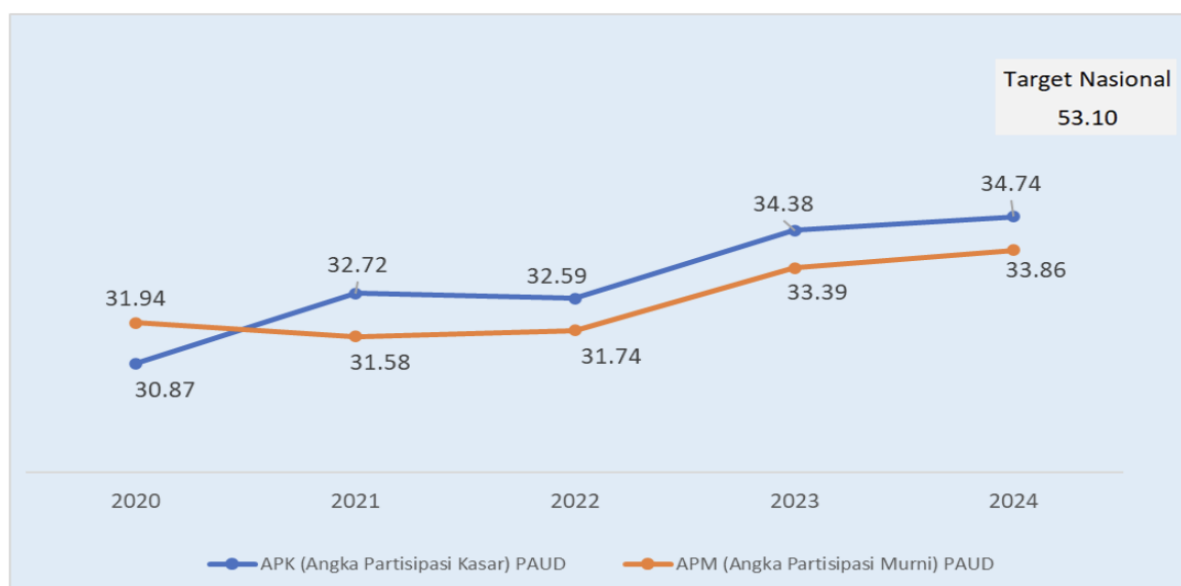
AKS NTT hasil Susenas Maret 2024 adalah sebesar 60,76. Hal ini menunjukkan bahwa, dari 100 siswa kelas 1 SD/ sederajat, ada sekitar 60—61 siswa yang pernah mengikuti pendidikan prasekolah jenis TK/RA/BA/PAUD sejenis lainnya. Sekalipun dalam 5 tahun terakhir, secara keseluruhan AKS NTT menggambarkan trend yang positif, angka ini masih jauh dibawah target nasional 2024 sebesar 75,79 seperti yang termuat dalam Renstra PAUD Dikdasmen 2020—2024



Gambar 1. Angka Kesiapan Sekolah (APK) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi prasekolah adalah APK dan APM PAUD. Mengingat regulasi pemerintah Indonesia yang menetapkan awal usia SD/ sederajat adalah 7 tahun, maka APK dan APM PAUD yang disajikan dalam publikasi ini memuat kelompok umur 3—6 tahun. APK PAUD dihitung melalui proporsi anak 0—6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah anak usia 3—6 tahun. Sedangkan APM PAUD diukur dengan membandingkan antara jumlah anak usia 3—6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah dan jumlah anak usia 3—6 tahun



Gambar 2. APK dan APM PAUD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

Adapun jika dijabarkan ke level kabupaten/kota, APK dan APM PAUD dengan nilai terendah ada di Kabupaten Manggarai Timur sedangkan wilayah dengan APK dan APM PAUD tertinggi ada di Kabupaten Sikka

Sekolah Dasar (SD)/Sederajat

SD/ sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar selama 6 tahun. Menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, calon peserta didik baru kelas 1 SD/ sederajat harus

memenuhi persyaratan usia 7 tahun. Terdapat pengecualian bagi calon peserta didik usia 5 atau 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

Partisipasi SD/ sederajat dapat diukur dengan beberapa ukuran tingkat partisipasi seperti APS (Angka Partisipasi Sekolah), APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APS 7—12 tahun mengukur proporsi penduduk usia 7—12 tahun yang bersekolah (tanpa mempertimbangkan jenjang pendidikan) terhadap total seluruh penduduk usia 7—12 tahun. Adapun APK SD/ sederajat menghitung proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat (tanpa memperhatikan kelompok umur) terhadap total seluruh anak usia 7—12 tahun. Sedangkan APM SD/ sederajat merupakan proporsi penduduk usia 7—12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat terhadap total seluruh anak usia 7—12 tahun. Partisipasi SD/ sederajat yang masuk dalam kalkulasi ini meliputi program Paket A, SDLB, SD dan MI, serta SPM/PDF Ula, baik dikelola secara negeri maupun swasta



Gambar 3. APK 7-12 Tahun, APK dan APM SD/ Sederajat Provinsi NTT

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

APS NTT usia 7—12 tahun sebesar 98,81, APK SD/ sederajat sebesar 110,58 dan APM SD/ sederajat sebesar 97,01. Nilai APK yang melebihi 100 persen mengindikasikan bahwa ada siswa berusia dibawah 7 tahun atau telah berumur lebih dari 12 tahun tapi masih duduk di

bangku SD/ sederajat. APM SD/ sederajat NTT sudah melebihi target pemerintah dalam Renstra Kemendikbudristek 2020—2024

Pada tahun 2024, APM tertinggi berada di Kabupaten Sumba Tengah dengan 99,30 dan APM terendah berada di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kota Kupang yang memiliki APM yang sama yaitu sebesar 93,98

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat

SMP/ sederajat adalah bentuk lanjutan dari satuan pendidikan dasar formal yang ditempuh selama 3 tahun. Menurut Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, calon peserta didik kelas 7 SMP/ sederajat harus memenuhi dua persyaratan berikut: (1) berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan (2) telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk pendidikan dasar lain yang sederajat

Partisipasi SMP/ sederajat dapat diukur dengan indikator angka partisipasi (APS, APK dan APM) dimana penyebut dari indikator ini mencakup anak usia 13—15 tahun. Jenis SMP/ sederajat yang dihitung meliputi Paket B, SMPLB, SMP dan MTs serta SPM/ PDF Wustha, baik dikelola secara negeri maupun swasta



Gambar 4. APS 13-15 Tahun, APK dan APM SMP/ Sederajat Provinsi NTT

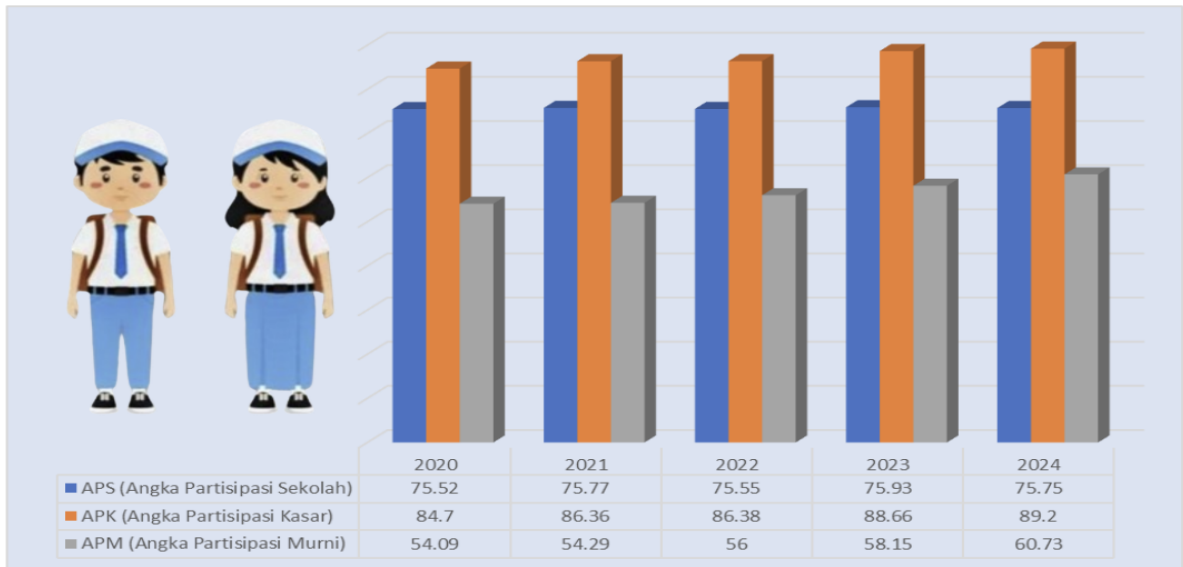
Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

- APS 13—15 tahun wilayah NTT sebesar 94,76 dengan Kabupaten Sabu Raijua adalah daerah dengan APS tertinggi sebesar 99,06 dan terendah Kabupaten Belu sebesar 91,11. Capaian APS usia 13—15 tahun di tingkat provinsi berada di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 94,76, sementara capaian nasional sebesar 96,17.
- APK SMP/ sederajat NTT 2024 sebesar 91,73 dan terendah Kabupaten Sumba Timur sebesar 79,64 menunjukkan bahwa progress NTT pada tahun 2024 tidak mencapai target pemerintah sebesar 100.
- APM jenjang SMP/ sederajat, hanya sekitar 73,72 anak yang bersekolah tepat waktu di jenjang tersebut . APM terendah di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 59,48 dan tertinggi di Kabupaten Sumba Tengah sebesar 84,31. APM SMP/ sederajat terus mengalami peningkatan sebuah tren positif yang perlu dijaga dan terus ditingkatkan.

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sederajat

SMA/ sederajat adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/ sederajat. Setara dengan SMA, adalah SMK yang menyediakan pendidikan kejuruan dengan spesifikasi keahlian yang lebih beragam.

SMA/ SMK/ sederajat juga dapat diukur dengan tiga indikator angka partisipasi (APS, APK dan APM). Cakupan umur siswa SMA/ SMK/ sederajat yang dijadikan sebagai penyebut dalam kalkulasi ini adalah penduduk usia 16—18 tahun. Adapun jenis SMA/ SMK yang dihitung meliputi Paket C, SMLB, SMA, MA, SMK dan MAK serta SPM/ PDF Ulya baik diselenggarakan pihak negeri atau swasta.



Gambar 5. APS 16- 18 Tahun, APK dam APM SMA/SMK/Sederajat Provinsi NTT

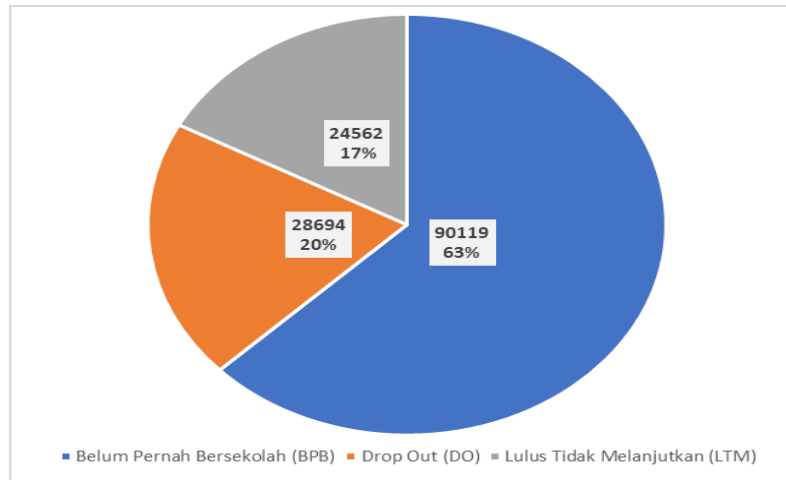
Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

- APS 16—18 tahun NTT sebesar 75,75 turun 0,18 poin dari tahun sebelumnya, dari perhitungan APS didapati bahwa sekitar tiga perempat penduduk usia 16—18 tahun masih status bersekolah terlepas dari jenjang apapun
- APK SMA/ sederajat sebesar 89,20 dari tahun ke tahun nilai APK jenjang SMA/ sederajat terus mengalami peningkatan, angka ini masih jauh dibawah harapan pemerintah yang menargetkan APK SMA/ sederajat tahun 2024 sebesar 95,00
- APM SMA/ sederajat sebesar 60,73 menunjukkan bahwa dari 100 anak usia 16—18 tahun, hanya ada sekitar 60 siswa yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat.

Data Anak Tidak Sekolah (ATS)

Masalah yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS mencakup anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan pada jenjang apapun, putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan

pada jenjang tertentu (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, atau SMA/ sederajat), dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai pendidikan menengah



Gambar 6. Data Anak Tidak Sekolah Tahun 2025

Sumber : Juli 2025 [Pusdatin Kemendikbud - ATS](#) (diolah)

Berdasarkan data BPS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2021, terdapat alasan anak tidak sekolah dikaitkan dengan aspek ekonomi, menjadi penyebab paling tinggi dari ATS, seperti alasan tidak ada biaya sekolah, dan bekerja/mencari nafkah.

ATS juga terjadi karena alasan menikah sebanyak, mengurus rumah tangga, disabilitas, sekolah jauh, serta perundungan. ATS terjadi tidak semata karena tidak tersedianya layanan pendidikan, kendala ekonomi, dan geografis. ATS dapat terjadi karena masih adanya hambatan yang berakar pada aspek sosial, dan budaya yang menjadikan anak terkendala dalam menjangkau layanan pendidikan

1.1.4. Kualitas Pendidikan

➤ Data Capaian Kinerja SPM Pendidikan

Perhitungan pencapaian SPM di daerah dijabarkan dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Kepmendikbudristek 195/M/2023 tentang Pedoman tata cara perhitungan indeks pencapaian SPM Pendidikan.

Hasil Rapor Pendidikan khususnya komponen **literasi, numerasi dan karakter** menjadi penentu indeks pencapaian SPM (IP-SPM) bidang Pendidikan



Gambar 7. Data Rapor Pendidikan 2023, 2024 dan 2025
Sumber : Rapor Pendidikan (diolah)

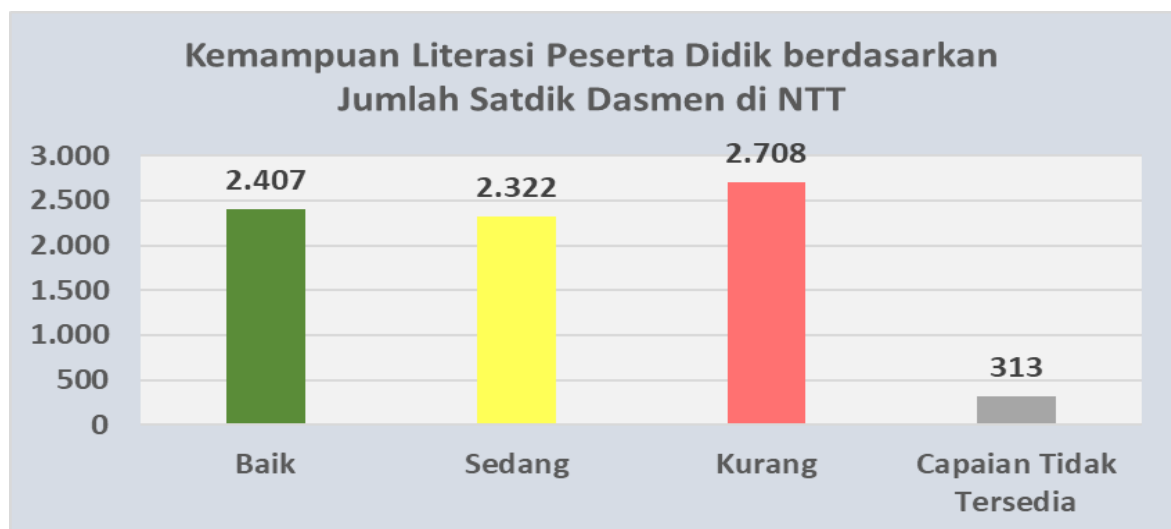
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan menjadi indikator penting untuk mengukur akses layanan dasar yang wajib diberikan kepada setiap anak usia sekolah. Karena itu, peningkatan capaian SPM terus menjadi fokus kerja BPMP NTT bersama pemerintah daerah.

Dalam tiga tahun terakhir, capaian menunjukkan tren positif. Tahun 2023, hanya 3 kabupaten mencapai kategori tuntas, sementara 20 lainnya belum tuntas. Tahun 2024, jumlah kabupaten belum tuntas turun menjadi 13, dengan 10 kabupaten masuk kategori tuntas. Tahun 2025, kemajuan semakin terlihat: hanya tersisa 7 kabupaten belum tuntas, dan 16 kabupaten telah mencapai tuntas muda dan pratama.

➤ Capaian Mutu

Kemampuan Literasi, Numerasi, Pendidikan Karakter, dan Kualitas Pembelajaran

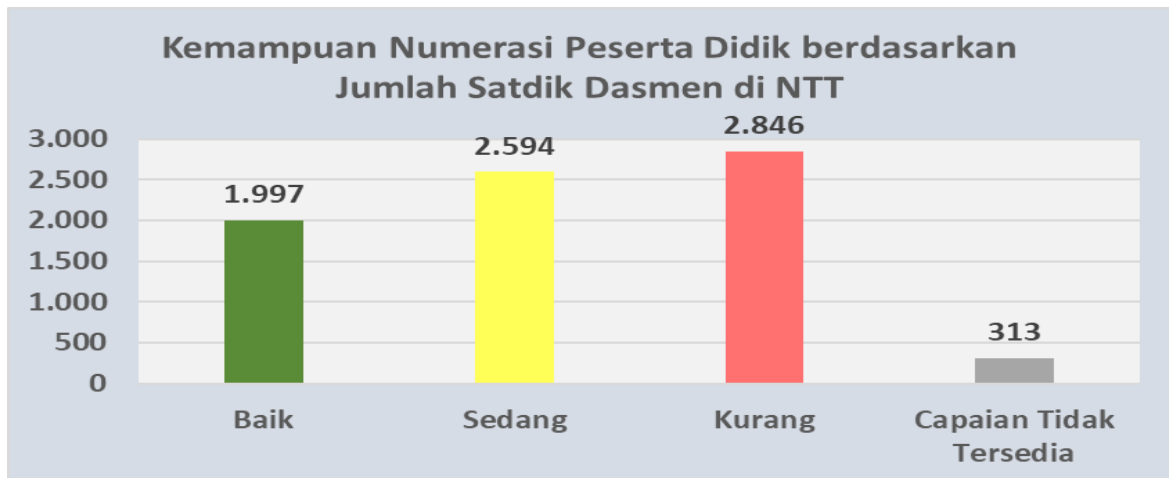
Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kemajuan negara. Peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang masih perlu diupayakan dengan peningkatan kualitas kurikulum, model pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem penilaian yang tepat, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai. Kualitas pendidikan juga perlu didukung dengan fasilitasi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Upaya yang dilakukan telah dapat mendorong perbaikan pembelajaran, yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik (learning outcome).



Gambar 8. Data Kemampuan Literasi Peserta Didik di Provinsi NTT

Sumber : Rapor Pendidikan 2025 (diolah)

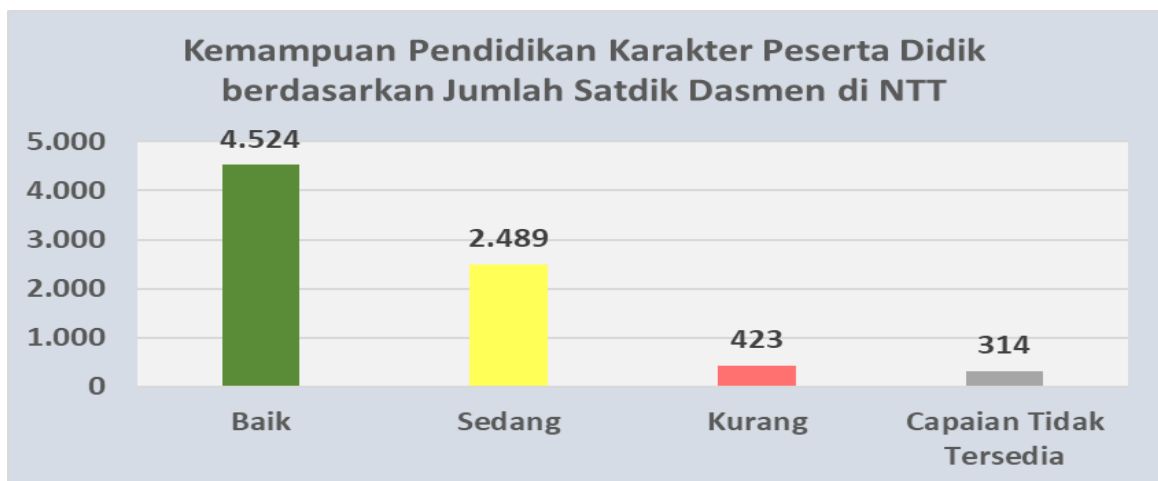
Data menunjukkan bahwa terdapat 2.407 satpen capaian literasinya berada pada kategori baik (hijau), 2.322 satpen capaian literasinya sedang (kuning), dan 2.708 satpen capaian literasinya kurang (merah). Berdasarkan gambar 8 di atas bahwa sebagian besar satuan pendidikan memiliki kemampuan **literasi** peserta didik pada kategori **Kurang**



Gambar 9. Data Kemampuan Numerasi Peserta Didik di Provinsi NTT

Sumber : Rapor Pendidikan 2025

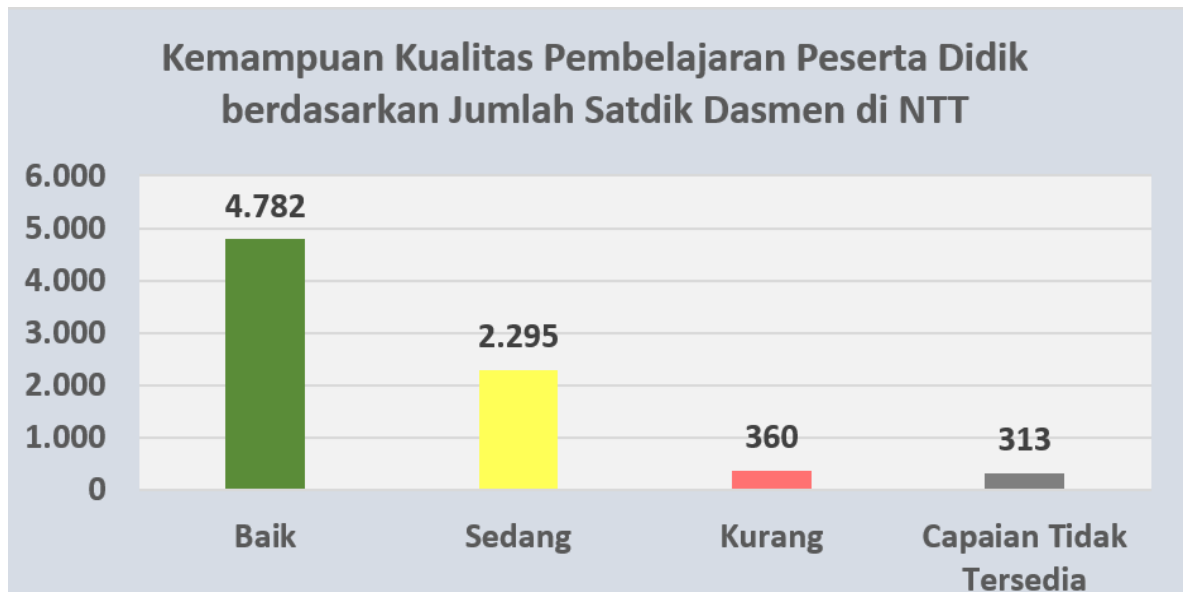
Data menunjukkan bahwa terdapat 1.997 satpen capaian numerasinya baik (hijau), 2.594 satpen capaian numerasinya sedang (kuning), dan 2.846 satpen capaian numerasinya kurang (merah). Berdasarkan gambar 9 di atas bahwa sebagian besar satuan pendidikan memiliki kemampuan **Numerasi** peserta didik pada kategori **Kurang**



Gambar 10. . Data Kemampuan Pendidikan Karakter Peserta Didik di Provinsi NTT

Sumber : Rapor Pendidikan 2025

Data menunjukkan bahwa terdapat 4.524 satpen capaian karakternya baik (hijau), 2.489 satpen capaian karakternya sedang (kuning), dan 423. Berdasarkan gambar 10 di atas bahwa sebagian besar satuan pendidikan memiliki kemampuan **Pendidikan Karakter** peserta didik pada kategori **Baik**



Gambar 11. Data Kemampuan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik di Provinsi NTT

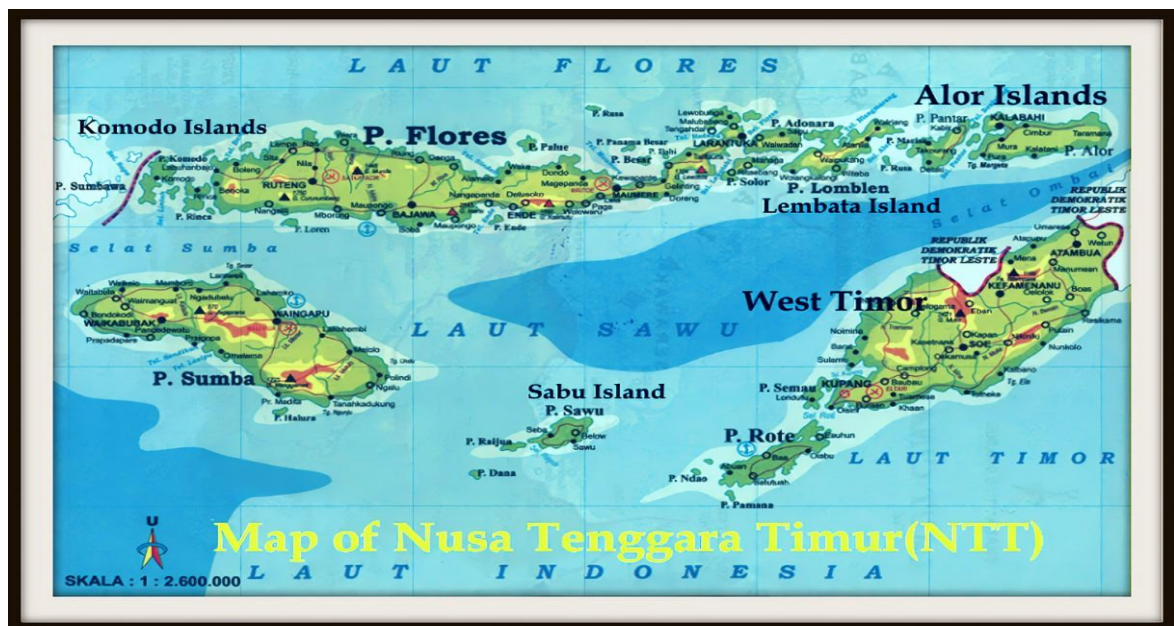
Sumber : Rapor Pendidikan 2025 (diolah)

Data menunjukan bahwa terdapat 4.782 satpen capaian kualitas pembelajarannya baik (hijau), 2.295 satpen capaian kualitas pembelajaran sedang (kuning), dan 360. satpen capaian kualitas pembelajarannya kurang (merah). Berdasarkan gambar 11 di atas bahwa sebagian besar satuan pendidikan memiliki kemampuan **Kualitas Pembelajaran** peserta didik pada kategori **Baik**

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi yang dimiliki

Untuk mendukung program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen dan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan sebagai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029. BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat sehingga berpotensi dalam mengawal serta mendukung keterlaksanaan program prioritas tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gambar 12. Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber : Letak Geografis kabupaten di NTT ~ FLOBAMORATA NTT

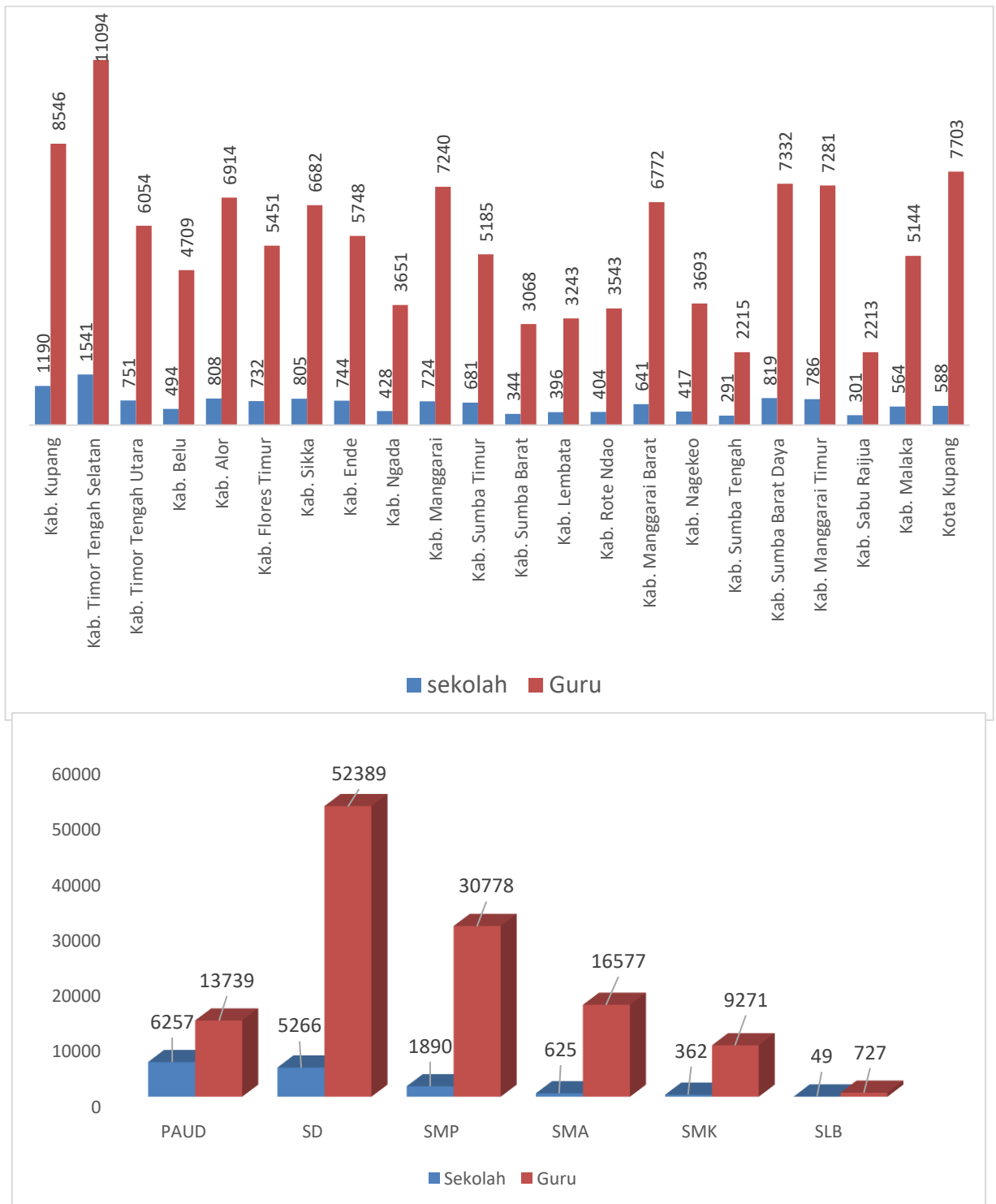
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota yang menjadi sasaran tugas BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tingkat kesulitan kondisi geografis beragam pada masing-masing kab/kota baik yang daratan maupun yang kepulauan sangat signifikan mempengaruhi intervensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Perlu digambarkan bahwa dari 22 kab/kota yang ada, hanya enam (6) kab/kota yang dapat dijangkau dengan perjalanan darat yaitu kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, dan kabupaten Malaka. Di daratan pulau Flores terdapat delapan (8) Kabupaten yaitu kabupaten Flores Timur, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat yang hanya boleh dijangkau dengan transportasi udara.

Di daratan pulau Sumba terdapat empat (4) kabupaten Sumba Raya, yaitu kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan kabupaten Sumba Barat Daya, juga hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara. Empat (4) kabupaten lainnya murni terpisah pulau dengan semua kab/kota yaitu kabupaten Lembata, dapat dijangkau dengan transportasi udara secara langsung atau transit melalui kabupaten Flores Timur dan dilanjutkan dengan perjalanan laut ke kabupaten.

Kabupaten Rote Ndao, kabupaten Alor, dan kabupaten Sabu Raijua, masing-masing dapat dijangkau dengan dua (2) pilihan yaitu dapat melalui transportasi udara dan laut. Pada daerah-daerah kepulauan, terdapat satuan pendidikan Dasmen di pulau-pulau kecilnya, sehingga untuk menjangkau ke sananya membutuhkan cuaca yang mendukung sekaligus transportasi yang memadai.

Berikut jumlah sekolah yang menjadi potensi dalam pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur **14.449 Sekolah** dan **123.481 Guru**



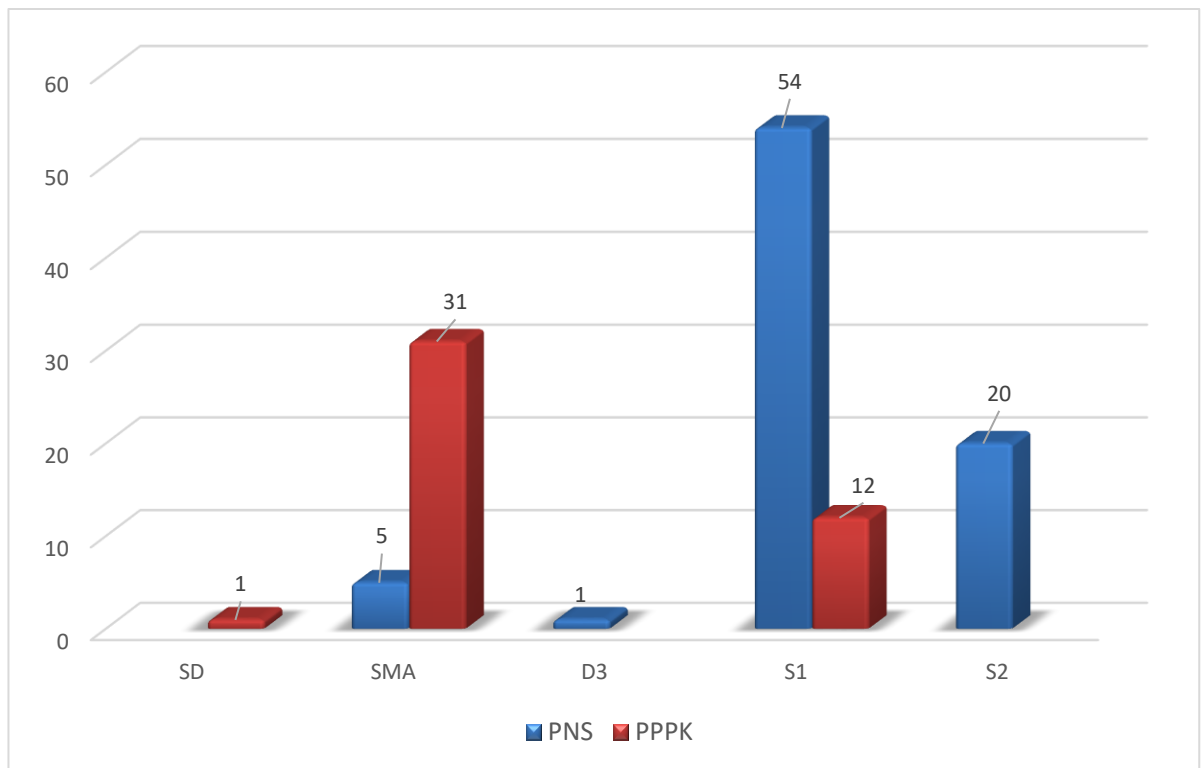
Gambar 13. Data Sekolah dan Guru Provinsi NTT
 Sumber : 25 September 2025 Beranda - Pauddikdasmen

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu potensi penting dalam mendukung keterlaksanaan program prioritas dan program Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen di Provinsi Nusa Tenggara Timur Peningkatan kompetensi SDM secara berkesinambungan diperlukan agar SDM yang tersedia dapat memberikan layanan dan manfaat secara optimal kepada masyarakat.

Komitmen dan upaya BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya adalah dengan cara melaksanakan program untuk peningkatan kompetensi pegawai seperti kegiatan In House Training (IHT), kegiatan Pengembangan Kapasitas Pegawai, dan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Spesifik Pegawai.

Jumlah ASN BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk PNS 80 orang dan PPPK 43 orang dengan jumlah keseluruhan 123 orang. Berikut rincian kualifikasi pendidikan pada gambar 14 dibawah ini.



Gambar 14. Data Jumlah Pegawai BPMP Provinsi NTT

Sumber : Oktober 2025 Data Kepegawaian BPMP Provinsi NTT

Sarana dan Prasarana

Upaya pelayanan prima terus ditingkatkan melalui pengembangan gedung perkantoran, , ruang aula, ruang kelas, asrama, lapangan olahraga dan sarana prasarana pendukung lainnya. Selain itu, jaringan internet sebagai pendukung teknologi informasi sudah menjangkau seluruh area gedung dalam rangka semakin memperkuat BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memberikan layanan bagi pelanggan.

Penggunaan sistem teknologi informasi juga digunakan dalam Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan berbagai layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan.

Fasilitas yang di miliki BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikuit

1. Asrama Flamboyan memiliki 8 kamar VIP dengan fasilitas ruang tamu umum ruang tamu khusus, teras santai, lobi, dan fasilitas lainnya seperti AC, TV, alat mandi, dan wifi.
2. Asrama A tedapat tiga lantai. lantai pertama adalah ruang kerja, lantai kedua dan lantai ketiga adalah memilik 36 kamar dengan masing-masing kamar terdapat dua single bed, TV, WIFI dan satu kamar mandi;
3. 6 ruang kelas yang masing-masing kelas bisa menampung 30 orang. setiap ruang kelas dilengkapi beberapa fasilitas seperti white board, spidol, dan ruangnya dilengkapi dengan AC
4. Ruang makan dengan kapasitas 100 orang ini dilengkapi dengan dapur, TV, Kipas angin, organ/piano, layar dan lcd
5. Unit Layanan Terpadu terdapat memiliki fasilitas seperti TV Pelayanan, dua loket pelayanan, meja pengaduan, mesin antri, kotak saran dan pengaduan, dan ruang tunggu.
6. Pos Satpan dilengkapi dengan buku tamu, ID Card untuk tamu, dan layar CCTV untuk memantau setiap sudut ruangan kantor

1.2.2. Permasalahan

Capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama selama 5 (lima) tahun berturut - turut perlahan menunjukkan kenaikan meskipun terdapat beberapa perubahan indikator capaian kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan hasil rapor pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2020 - 2025 masih terdapat Kabupaten dan Kota yang menunjukkan capaian nilai literasi dan numerasi dibawah rata - rata nilai nasional, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) masih di bawah rata-rata nasional.
- Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi NTT masih tinggi sebanyak 143.375.
- Capaian SPM tahun 2025 di 7 kabupaten/kota berada pada kategori tuntas pratama, 9 kabupaten tuntas muda dan 7 kabupaten belum tuntas, seharusnya 23 Provinsi/Kab/Kota tuntas paripurna
- Capaian mutu (literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kualitas pembelajaran) masih rendah di Provinsi NTT.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029 mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah :

*“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama
Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikdasmen, dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Sejalan dengan tugas dan kewenangan Kemendikdasmen dalam melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerjasama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2.2. Tujuan dan Indikator Tujuan

Perumusan tujuan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mengacu kepada tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perumusan tujuan Kementerian ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi - misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan turunan dari Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut :

Tabel 5. Tujuan dan Indikator Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

No	Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Indikator Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD 2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. Literasi Membaca b. Numerasi 3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik
3	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

Tabel 6. Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Tujuan BPMP Provinsi NTT	Indikator Tujuan BPMP Provinsi NTT
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD 2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi Membaca b. Numerasi 3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik
3	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel di Provinsi Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kategori sangat baik 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur minimal A

2.3. Sasaran Strategis

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, sebagai berikut:

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

No	Indikator Tujuan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Sasaran Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Menguatnya sistem tata kelola Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Indikator Tujuan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur
1	Meningkatnya akses layanan dan hasil belajar anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan yang berkeadilan	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen 1. Satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur memenuhi SPM pendidikan
2	Menguatnya sistem tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kategori sangat baik 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur minimal A

Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 9. Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indikasi Risiko

No	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Indikator Risiko
1	<p>Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur memenuhi SPM pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya penanganan dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak optimal dilakukan karena tidak tersedianya data ATS yang memadai serta belum terjalannya sinergi lintas sektor untuk mengatasi dampak negatif yang mengakar pada sosial budaya sehingga menyebabkan anak tidak bersekolah. 2. Hasil asesmen pendidikan tidak dimanfaatkan untuk penguatan dan perbaikan inovasi pembelajaran dan pengajaran. 3. Pemda belum optimal dalam menyusun program dan anggaran kegiatan untuk penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	<p>Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja anggaran tidak optimal karena kebijakan efisiensi anggaran (blokir anggaran) pada pelaksanaan DIPA sampai dengan akhir tahun. 2. Tidak bertambahnya jumlah SDM yang mengikuti Diklat SAKIP. 3. Satker tidak mendapatkan penghargaan selama tahun anggaran berjalan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) yaitu :

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.

Tabel 10. Sasaran Strategis Diten PAUID, Dikdas, dan Dikmen dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Prioritas Nasional 4

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah kebijakan dan strategi BB/BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam mendukung agenda pembangunan pada periode 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sasaran Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan dan strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang selaras dengan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Arah Kebijakan Kemendikdasmen	Strategi Kemendikdasmen
1.	Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan	● Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.

No.	Arah Kebijakan Kemendikdasmen	Strategi Kemendikdasmen
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
2	Penguatan tata kelola serta akuntabilitas Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong). • Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah. • Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

Tabel di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unit pelaksana teknis dengan instansi terkait serta pemerintah daerah dan satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Prinsip mendasar yang menjadi pedoman arah kebijakan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mendukung arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Arah kebijakan, strategi, dan program BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendukung strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kondisi yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

- ❖ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur memenuhi SPM pendidikan

Strategi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Pembinaan Pembelajaran dan Penilaian melalui sosialisasi pembelajaran mendalam (Deep Learning) kepada satuan pendidikan;
- Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk membantu daerah dalam menyusun perencanaan yang komprehensif dan melaksanakan program-program peningkatan mutu pendidikan berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta melaksanakan supervisi Implementasi Sistem (PMP) dan edukasi penggunaan SNP di Satuan Pendidikan;
- Pendampingan, bimtek dan monitoring program Revitalisasi Satuan Pendidikan bersama mitra;
- Pembinaan Kemitraan untuk membangun komitmen dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pusat di daerah
- Pembinaan Digitalisasi Sekolah untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan rumah pendidikan, pengembangan konten pembelajaran dalam mendukung program digitalisasi pembelajaran, serta memastikan pemanfaatan bantuan digitalisasi dilakukan secara tepat.
- Pembinaan Penguatan Pendidikan Karakter untuk mendampingi serta mengadvokasi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan pemantauan pelaksanaan program MBG di daerah.

2. Tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut :

- ❖ Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kategori sangat baik
- ❖ Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur minimal A

Strategi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan pemerintah daerah;
- Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
- Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbasis mekanisme manajemen talenta;
- Melakukan inovasi dalam meningkatkan layanan internal dan eksternal BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.3. Kerangka Regulasi

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berpijak pada kerangka regulasi yang relevan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Permendikdasmen Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Kemendikdasmen dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal. Kerangka kelembagaan ini diharapkan dapat memastikan penataan organisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis, serta meningkatkan efektivitas kelembagaan melalui struktur organisasi yang tepat, proses organisasi yang efisien, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

Tugas dan Fungsi BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut

Tugas

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

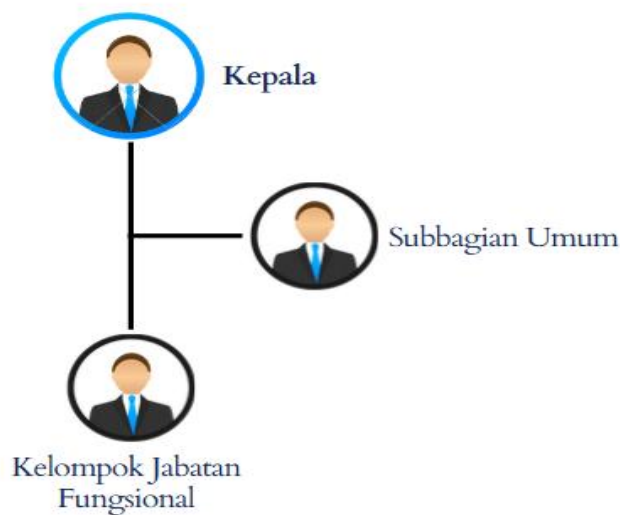
Fungsi

- Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;

- Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- Pelaksanaan urusan administrasi.

3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP.



Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.4.2 Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pengelolaan aparatur sipil negara dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 13. Aparatur Sipil Negara BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Tenaga Struktural	2 Orang
2.	Tenaga Fungsional	78 Orang
3.	Tenaga PPPK	43 Orang
Total		123 Orang

Data per 31 Agustus 2025

Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025-2029

Proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 14. Proyeksi kebutuhan SDM BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029

No	Unit Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur	123	116	109	102	95

3.4.3. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen juga merupakan hal yang sangat penting.

BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikdasmen, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

Tabel 15. 6 Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	a. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur b. Perencanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
2	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Penerapan Pos yang telah disederhanakan b. Implementasi SPBE mendukung pelayanan internal dan pelayanan publik
3.	Penguatan Manajemen SDM	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	a. Peningkatan Kompetensi SDM setiap hari senin (SEIRAMA) b. Penempatan pegawai berdasarkan hasil asesmen dan peta jabatan c. Implementasi kode etik
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	a. Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (<i>collaborative</i>) b. Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
5.	Penguatan Pengawasan	Kepatuhan dan integritas	a. Pelaporan Whistle Blowing, dan konflik kepentingan terintegrasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud b. Pengendalian gratifikasi c. Audit Internal oleh SPI dan SPIP
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	a. Pelayanan Prima b. Indeks Persepsi Kualitas Layanan 3,73 Sangat Baik (A) c. Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,00 Sangat Baik (A)

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta mendukung tercapainya tujuan dari Program Prioritas Kementerian yang telah diturunkan menjadi kebijakan strategis dan program pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat di Daerah juga menetapkan Sasaran Strategis sebagai tujuan yang ingin dicapai berdasarkan tugas penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dalam lima tahun kedepan kedalam Sasaran Program dan Kegiatan. Capaian setiap Sasaran Program (SP) maupun Sasaran Kegiatan (SK) diukur menggunakan Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan BPMP Provinsi NTT ditetapkan merujuk kepada Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja dari Ditjen PAUD Dikdas, dan Dikmen Kemendikdasmen. Berikut Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai berikut:

Tabel 16. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

Kode	Uraian	Satuan	Target (%)					
			2025	2026	2027	2028	2029	
SS	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua							
IKSS	Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD (RPJMN-PP)	%	64,39	64,60	64,79	64,96	65,13	
IKSS	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	%	92,44	92,50	92,57	92,64	92,71	

Kode	Uraian	Satuan	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD	Nilai	64,78	65,58	66,38	67,18	67,98
SP	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan						
IKP 2.1.1	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PAUD dengan Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD pada kategori baik	%	19,84	24,71	29,57	34,44	39,30
IKSS 2.2	Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional						
	a. Literasi Membaca	%	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
	b. Numerasi	%	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35
IKP 2.2.10	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	%	44,59	45,59	46,59	47,59	48,59
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik	%	33,24	33,45	33,66	33,87	34,08
IKP 2.3.2	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	66,02	67,83	70,80	72,16	73,69
SS	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
SP	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian						
IKSS	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	%	89,35	90	90,1	90,2	90,3
IKP 5.1.21	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Kode	Uraian	Satuan	Target (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKP 5.1.22	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Predikat	A	A	A	A	AA

Tabel 17. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kode	Uraian	Satuan	Target (%)					
			2025	2026	2027	2028	2029	
SK.1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen							
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	%	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34	
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	%	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61	
SK.2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur							
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur minimal A	Predikat	A	A	A	A	A	

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka diperlukan dukungan sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025 - 2029

Program/Kegiatan	Indikator Pendanaan				
	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	17.723	20.466	21.490	22.564	23.693
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	17.197	220477	21.490	22.564	23.693
Total	34.920	40.933	42.980	45.129	47.386

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BPMP Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029 memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 - 2029.

Dalam Rencana Strategis diuraikan secara sistematis tujuan strategis, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara pada pencapaian visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai amanat yang harus diemban oleh BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2025 - 2029. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari klasifikasi rincian output (1) Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya; (2) Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan; (3) Layanan BMN; (4) Layanan Umum; (5) Layanan Perkantoran .

Dengan adanya renstra ini, seluruh kegiatan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada indikator kinerja baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan, tata kelola dan efektivitas birokrasi serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan serta untuk memastikan bahwa arah kebijakan pengelolaan BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur selaras dengan arah kebijakan dan pengelolaan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	:	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran
Definisi	:	<p>Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah akan dievaluasi mutunya secara berkala melalui asesmen. Evaluasi tersebut mencakup pengukuran kompetensi kognitif: literasi numerasi, kompetensi sosial emosional berupa profil pelajar Pancasila, serta kualitas lingkungan belajarnya. Data capaian kompetensi tersebut akan menjadi basis penyusunan profil dan rapor satuan Pendidikan.</p> <p>Pengukuran kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya dapat digunakan untuk informasi refleksi diri namun juga dapat memetakan kualitas antar satuan pendidikan, kualitas antar kab/kota, antar provinsi dan nasional. Agar perbandingan tersebut dapat dilakukan secara optimal tanpa bias, maka pengukuran kompetensi dilakukan secara terstandar. Standardisasi tersebut dicapai melalui penggunaan instrumen terstandar, system delivery terstandar dan pelaksanaan yang mengacu pada suatu standar operasional prosedur. Program Kemendikbudristek untuk melakukan pengukuran terstandar adalah Asesmen Nasional.</p> <p>Asesmen Nasional terdiri dari penilaian Asesmen Kompetensi Minimum (Literasi dan Numerasi), Survei Karakter, dan Survei lingkungan belajar. Asesmen Nasional (AN) bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan bukan mengevaluasi hasil belajar individu murid. Oleh karena itu AN diikuti oleh seluruh satuan Pendidikan jenjang dasar menengah baik pendidikan formal maupun non formal. Responden AN adalah sampel murid kelas 5, 8 dan 11, seluruh kepala satuan Pendidikan dan seluruh guru. Hasil AN tersebut dapat menggambarkan kompetensi kognitif murid, karakter murid, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas satuan Pendidikan. Diharapkan sekolah dapat melakukan perencanaan berbasis data untuk evaluasi diri dari waktu ke waktu</p>

Metode Penghitungan	:	(Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran)/(Jumlah seluruh satuan pendidikan)*100%
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	:	AN, Rapor Pendidikan
Variabel data	:	variabel yang berpengaruh terhadap perhitungan indikator
Instansi Penghasil Data	:	Pusdatin, BSKAP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi Indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
Interpretasi		Interpretasi terkait polarisasi indikator
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	-
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Diisikan Jenis kelamin/ Desa/Kota/Lainnya/Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	:	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen
IKK	:	[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan
Definisi	:	<p>SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. (Permendikbud No. 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan)</p> <p>tinggi > rendah [2023 \Rightarrow 2024]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntas Paripurna 100 2. Tuntas Utama 90-99 3. Tuntas Madya 80-89 [0,36% \Rightarrow 13,41%] 4. Tuntas Pratama 70-79 [11,41% \Rightarrow 29,35%] 5. Tuntas Muda 60-69 [27,54% \Rightarrow 39,13%] 6. Belum Tuntas <60 [59,60% \Rightarrow 18,12%] <p>perhitungan : hanya level pratama dan madya</p> <p>Formula Indeks Capaian SPM :</p> <p>Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima Layanan (80%)</p> <p>Nilai capaian SPM diperoleh melalui penghitungan rerata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima</p>

Metode Penghitungan	:	$(\text{Provinsi/Kab/kota yang memenuhi SPM pendidikan})/(\text{Jumlah seluruh provinsi/kab/kota}) \times 100\%$
Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	:	AN, Rapor Pendidikan
Variabel data	:	variabel yang berpengaruh terhadap perhitungan indikator
Instansi Penghasil Data	:	Pusdatin, BSKAP
Polarisasi Indikator	:	Maksimal: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi Indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
Interpretasi		Interpretasi terkait polarisasi indikator
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	-
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Diisikan Jenis kelamin/ Desa/Kota/Lainnya/Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen												
SK	:	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur												
IKK		[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori sangat baik												
Definisi	:	Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran												
Metode Penghitungan	:	<div>Nilai Kinerja Anggaran : $[50\% \times \text{Nilai IKPA}] + [50\% \times \text{Nilai EKA}]$</div>												
Satuan	:	<div>Kategori<table><tr><th>Nilai Kinerja Anggaran</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>>90%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>>80%-90%</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>60%-80%</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>>50%-60%</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>>50%</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table></div>	Nilai Kinerja Anggaran	Kategori	>90%	Sangat Baik	>80%-90%	Baik	>60%-80%	Cukup	>50%-60%	Kurang	>50%	Sangat Kurang
Nilai Kinerja Anggaran	Kategori													
>90%	Sangat Baik													
>80%-90%	Baik													
>60%-80%	Cukup													
>50%-60%	Kurang													
>50%	Sangat Kurang													
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir												
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah												

Sumber Data	:	Aplikasi Krisna, Sakti, Kemenkeu
Variabel data	:	variabel yang berpengaruh terhadap perhitungan indikator
Instansi Penghasil Data	:	Bappenas, kemenkeu
Polarisasi Indikator	:	Maksimal: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi Indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
Interpretasi		Interpretasi terkait polarisasi indikator
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	-
Level Estimasi	:	-
Klasifikasi	:	Diisikan Jenis kelamin/ Desa/Kota/Lainnya/Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

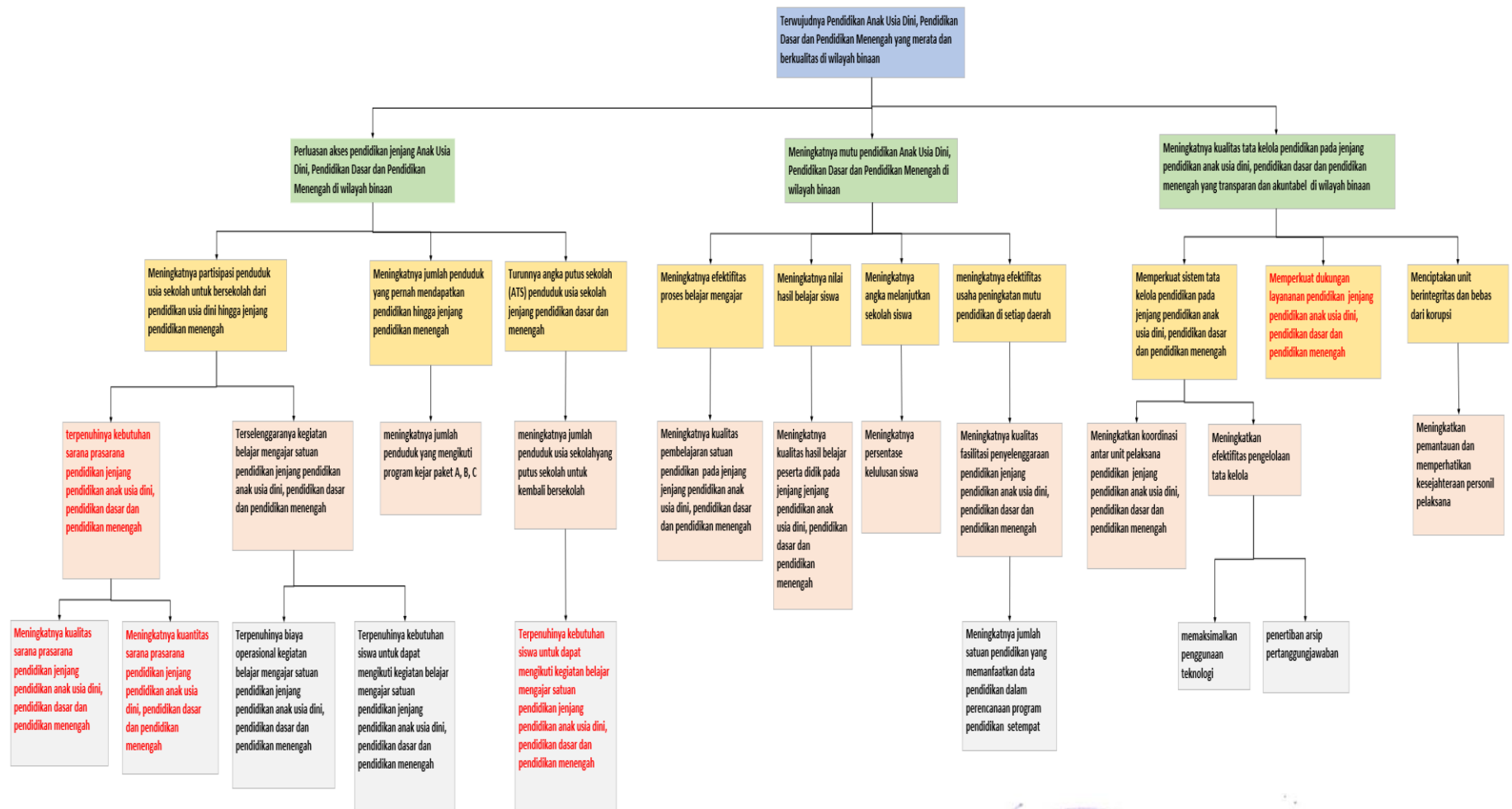
Program	:	Dukungan Manajemen																								
SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen																								
	:	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur																								
IKK	:	Persentase Satker Di Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A																								
	:	[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																								
Definisi	:	<p>Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "A" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "A", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.</p> <p>Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p>																								
Metode Penghitungan	:	$\text{Nilai Sakip} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] \\ + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$																								
Satuan	:	Predikat <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th><th>Predikat</th><th>Interprestasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90-100</td><td>AA</td><td>Sangat memuaskan</td></tr> <tr> <td>>80-90</td><td>A</td><td>Memuaskan</td></tr> <tr> <td>>70-80</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>>60-70</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>>50-60</td><td>CC</td><td>Cukup (memadai)</td></tr> <tr> <td>>30-50</td><td>C</td><td>Kurang</td></tr> <tr> <td>0-30</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td></tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interprestasi	>90-100	AA	Sangat memuaskan	>80-90	A	Memuaskan	>70-80	BB	Sangat Baik	>60-70	B	Baik	>50-60	CC	Cukup (memadai)	>30-50	C	Kurang	0-30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interprestasi																								
>90-100	AA	Sangat memuaskan																								
>80-90	A	Memuaskan																								
>70-80	BB	Sangat Baik																								
>60-70	B	Baik																								
>50-60	CC	Cukup (memadai)																								
>30-50	C	Kurang																								
0-30	D	Sangat Kurang																								

Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Sumber Data	:	Setjen
Variabel data	:	variabel yang berpengaruh terhadap perhitungan indikator
Instansi Penghasil Data	:	Setjen, Itjen
Polarisasi Indikator	:	Maksimal: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi Indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
Interpretasi		Interpretasi terkait polarisasi indikator
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	-
Level Estimasi	:	-
Klasifikasi	:	Diisikan Jenis kelamin/ Desa/Kota/Lainnya/Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Lampiran 3. Matrik Kinerja dan Pendanaan

Kode	Uraian	Satuan	Target (%)					Rencana Pendanaan (Milyar)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen							17.723	20.466	21.490	22.564	23.693
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64,06	65,34	66,64	67,98	69,34					
IKK 1.2	Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57,61	67,75	72,64	77,72	82,61					
SK.2	Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur							17.197	220477	21.490	22.564	23.693
IKK 2.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik					
IKK 2.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur minimal A	Predikat	A	A	A	A	A					

Lampiran 4. Pohon Kinerja



catatan:
font merah blm memiliki intervensi

Kupang, 15 Oktober 2025

Pt. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Ifra Karim, S.I.Pem, M.Pd

NIP. 197006262005011001



BPMP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR